

**RENCANA KERJA  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
(RENJA PERUBAHAN)**

**TAHUN ANGGARAN 2023**



**PEMERINTAH DAERAH SULAWESI TENGAH  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,  
PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI  
SULAWESI TENGAH**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Karunianya sehingga Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (RENJA) Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 Dapat Selesai dengan target waktu yang direncanakan. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan dilakukan untuk merencanakan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah berdasarkan Urusan Pemerintahan yakni urusan Komunikasi Informatika, urusan Persandian dan urusan Statistik melalui kebijakan Program. Kegiatan, Realisasi Masukan (Input) Keluaran (Output) dan hasil ( Outcome) dalam rangka mencapai hasil yang Konstruktif.

Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahunan ini diharapkan dapat memberikan Informasi Data Program Dan Kegiatan, dalam bentuk kerangka Regulasi dan kerangka Anggaran dalam Rangka menjamin Penyelenggaraan Pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan Pembangunan Daerah, kami berkomitmen agar tetap memberikan pelayanan terbaik serta berharap pada semua pemangku kepentingan dapat memberikan saran yang konstruktif dalam pelaksanaannya.

Disadari bahwa dalam Penyusunan Laporan Tahunan ini masih terdapat Kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat di harapkan untuk perbaikan ke depan demi Kemajuan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah.

Akhirnya kami berharap kepada seluruh Aparatur Sipil Negara dilingkup Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah dapat menjadikan dokumen ini sebagai Rencana kerja Perubahan yang aplikatif dalam melaksanakan Program dan Kegiatan di Tahun 2023, dan semoga memberikan manfaat bagi semua, khususnya Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu, 28 April 2023

KEPALA DINAS  
KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN  
STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH



**SUDARYANO R. LAMANGKONA, S.Sos., M.Si**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19690730 199603 1 003

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	
Kata Pengantar.....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	4
1.4. Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .....</b>	<b>6</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	25
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah...	45
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	49
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	72
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....</b>	<b>73</b>
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	73
3.2. Tujuan dan Sasaran.....	76
3.3. Program dan Kegiatan .....	77
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>100</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>121</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah atau yang sering disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) yang berisi informasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran yang dilengkapi dengan kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta memberikan gambaran mengenai tujuan, sasaran dan target kinerja dan bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan PD (Perangkat Daerah) sesuai tugas dan fungsinya. Rancangan Rencana Kerja Perubahan (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 memuat program/ kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan kebutuhan yang berorientasi skala prioritas sesuai dengan sumber daya yang dimiliki.

Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD).

Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari Visi, Misi dan Program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (RKPD).

2. Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik dimaksudkan untuk mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan.
3. Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Tahun 2023 ini merupakan dokumen yang akan mengawali pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik untuk pertama kalinya, sehingga perlu kiranya disusun secara cermat agar dapat digunakan sesuai dengan kewenangan yang telah diembankan.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja OPD adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- d. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
- g. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
- h. Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Badan Siber dan Sandi Negara;
- i. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- j. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- l. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembarab Negara RI Tahun 2016);
- n. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
- o. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- p. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- q. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- r. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
- s. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;
- t. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005 – 2025;
- u. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033;
- v. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 3 tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Komunikasi Informatika;
- w. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun

- 2021 – 2026 (Lembar Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 140, Tambahan Lembar Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 126);
- x. Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik Provinsi;
  - y. Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi;
  - z. Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Perangkat Daerah Jajaran Provinsi Sulawesi Tengah.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 untuk memberikan landasan bagi para penyelenggara Pemerintahan di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Tujuannya adalah untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan dan mempertajam skala prioritas pembangunan. Tujuan tersebut meliputi :

- a. Meningkatkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaannya;
- b. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program;
- c. Menyelaraskan program dengan penganggaran;
- d. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan;
- e. Terwujudnya keselarasan perencanaan 5 (lima) tahunan dengan perencanaan tahunan;
- f. Terwujudnya keselarasan antara dokumen perencanaan tahunan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah dengan dokumen Rencana Kerja Perubahan Pembangunan Daerah (RKPD);
- g. Terwujudnya dasar yang kokoh bagi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran

## **1.4 Sistematika Penulisan**

### **Bab I   Pendahuluan**

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Maksud dan Tujuan.
- 1.4. Sistematika Penulisan.

### **Bab II   Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Tahun Lalu**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### **Bab III   Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan**

- 3.1. Tujuan
- 3.2. Sasaran
- 3.3. Program dan Kegiatan

### **Bab IV   Penutup**



## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Perubahan (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun 2022. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

##### **A. Penetapan Indikator Kinerja**

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*). Indikator - indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan

penetapan besaran indikator kinerja untuk masing - masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

## **B. Capaian Analisis Kinerja**

Capaian kinerja merupakan informasi yang berisikan ukuran kinerja yang dicapai setelah dilaksanakannya suatu program/kegiatan. Capaian kinerja harus berupa angka numerik dan berdasarkan fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya. Pelaksanaan kegiatan organisasi yang dijalankan oleh sumber daya manusia, uang, peralatan dan metode sangat menentukan berhasil atau tidaknya pencapaian sasaran organisasi pada akhir periode pelaksanaan.

Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja dan Pencapaian hasil realisasi kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**, dengan indikator kegiatan sebagai berikut:
  - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target/rencana tingkat capaian 62 Indeks dan telah tercapai 62 Indeks
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah tingkat capaian 4 Laporan dan telah tercapai 4 Laporan
  - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan target/rencana tingkat capaian 2 Laporan dan telah tercapai 2 Laporan
  - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan target/rencana tingkat capaian 78 Indeks dan telah tercapai 78 Indeks
  - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan target/rencana tingkat capaian 6 laporan dan telah tercapai 6 laporan
  - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target/rencana tingkat capaian 3 laporan dan telah tercapai 3 laporan
  - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target/rencana tingkat capaian 1 laporan dan telah tercapai 1 laporan

- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target/rencana tingkat capaian 3 laporan dan telah tercapai 3 laporan
- 2. **Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**, dengan indikator kegiatan sebagai berikut:
  - a. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah provinsi dengan target/rencana tingkat capaian 20% dan telah tercapai 20%
- 3. **Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**, dengan indikator kegiatan sebagai berikut:
  - a. Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi dengan target/rencana tingkat capaian 20 Domain dan telah tercapai 20 Domain
  - b. Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi dengan target/rencana tingkat capaian 20 OPD dan telah tercapai 20 OPD
- 4. **Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**, dengan indikator kegiatan sebagai berikut:
  - a. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi dengan target/rencana tingkat capaian 43 sektoral dan telah tercapai 43 sektoral
- 5. **Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi**, dengan indikator kegiatan sebagai berikut:
  - a. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi dengan target/rencana tingkat capaian 20% dan telah tercapai 20%

Evaluasi dan analisis kinerja kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah beserta indikatornya dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut :



**Tabel 2.1**  
**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH**  
**DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2022**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun .....	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun n-1)	Realisasi Program dan Kegiatan (Renja PD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja PD tahun n-2	Realisasi Renja tahun n-2	Tingkat Realisasi %			Realisasi capaian Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = 5+7+10	12 = 11/4
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</b>	<b>64 Indeks</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>92%</b>	<b>92%</b>	<b>62 Indeks</b>	<b>51.06 Indeks</b>	<b>51.06 Indeks</b>	<b>0.82</b>

<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>	<b>74 Indeks</b>	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>70 Indeks</b>	<b>72.63 Indeks</b>	<b>72.63 Indeks</b>	<b>1.04</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	3 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	1
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Realisasi Anggaran</b>	<b>4 Laporan</b>	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>4 Laporan</b>	<b>4 Laporan</b>	<b>4 Laporan</b>	<b>1</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/12 Bulan	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	58 Orang/12 Bulan	58 Orang/12 Bulan	58 Orang/12 Bulan	1
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>2 Laporan</b>	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>1</b>
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>78 Indeks</b>	-	<b>100%</b>	<b>33%</b>	<b>33%</b>	<b>78 Indeks</b>	<b>80 Indeks</b>	<b>80 Indeks</b>	<b>1.03</b>

*Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023*

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	-	-	-	-	1 paket	0	0	0
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 laporan	-	-	-	-	1 laporan	0	0	0
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	-	12 Bulan	4 Bulan	33%	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa</b>	<b>6 laporan</b>	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>6 laporan</b>	<b>4 laporan</b>	<b>4 laporan</b>	0.67
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	-	12 Bulan	12 Bulan	100%	1 paket	1 paket	1 paket	1
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 paket	-	12 Bulan	12 Bulan	100%	7 paket	8 paket	8 paket	1.14
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	-	12 Bulan	12 Bulan	100%	1 paket	1 paket	1 paket	1



Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 laporan	-	12 Bulan	12 Bulan	100%	2 laporan	2 laporan	2 laporan	1
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	0	0	0
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>3 laporan</b>	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>3 laporan</b>	<b>4 laporan</b>	<b>4 laporan</b>	1.33
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	-	1 Tahun	1 Tahun	100%	4 Paket	4 Paket	4 Paket	1
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	-	1 Tahun	1 Tahun	100%	25 Unit	25 Unit	25 Unit	1
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1 laporan</b>	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>1 laporan</b>	<b>1 laporan</b>	<b>1 laporan</b>	1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	-	12 Bulan	12 Bulan	100%	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1

<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3 laporan</b>	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>3 laporan</b>	<b>3 laporan</b>	<b>3 laporan</b>	<b>1</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	28 Unit	-	12 Bulan	12 Bulan	100%	28 Unit	28 Unit	28 Unit	1
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1.260 Unit	-	12 Bulan	12 Bulan	100%	1260 Unit	34 Unit	34 Unit	0.027
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	-	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1
<b>Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik</b>	<b>Persentase akses Layanan Informasi dan Komunikasi Publik yang transparan</b>	<b>95%</b>	-	<b>100%</b>	<b>93%</b>	<b>93%</b>	<b>45%</b>	<b>93%</b>	<b>93%</b>	<b>2.07</b>
	<b>Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah</b>	<b>0.009%</b>	-	-	-	-	<b>0.009%</b>	<b>0.064%</b>	<b>0.064%</b>	<b>6.67</b>

<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase terkelolanya informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah provinsi</b>	<b>40%</b>		<b>100%</b>	<b>93%</b>	<b>93%</b>	<b>20%</b>	<b>2.90%</b>	<b>2.90%</b>	0.15
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	4 dokumen	-	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100%	4 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	0.75
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	30 dokumen	-	4 Media	4 Media	100%	20 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	0.35
Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	40 dokumen	-	10 Kegiatan	10 Kegiatan	100%	40 dokumen	11 dokumen	11 dokumen	0.275
Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	30 layanan	-	4 Media	4 Media	100%	20 layanan	9 layanan	9 layanan	0.45
Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	3 dokumen	-	10 KIM	4 KIM	40%	3 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	1.33
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	200 orang	-	30 Peserta	30 Peserta	100%	150 orang	150 orang	150 orang	1
Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	2 dokumen	-	12 Sengket	12 Sengket	100%	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	1

Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	4 dokumen	-	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100%	4 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	1.25
Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	2 unit	-	5%	5%	100%	2 unit	2 unit	2 unit	1
<b>Program Pengelolaan Aplikasi Informatika</b>	<b>Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>
	<b>Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1</b>

	<b>Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan</b>	<b>5.56%</b>	-	-	-	-	<b>5.56%</b>	<b>26%</b>	<b>26%</b>	<b>4.68</b>
<b>Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah Nama Domain dan Subdomain yang dikelola</b>	<b>25 Domain</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>20 Domain</b>	<b>32 Domain</b>	<b>32 Domain</b>	<b>1.6</b>
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	54 Unit	-	54 OPD	54 OPD	100%	54 Unit	48 Unit	48 Unit	0.89
<b>Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah Perangkat Daerah yang mengelola SPBE</b>	<b>20 OPD</b>	-	<b>15 OPD</b>	<b>15 OPD</b>	<b>100%</b>	<b>20 OPD</b>	<b>14 OPD</b>	<b>14 OPD</b>	<b>0.93</b>
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	7 Unit	-	3 Pusat Data	3 Pusat Data	100%	5 Unit	3 Unit	3 Unit	0.6

Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	1 Unit	-	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100%	1 Unit	0	0	0
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1
<b>Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>	<b>Persentase Cakupan Informasi / Data Statistik Sektoral</b>	<b>30%</b>	-	<b>100%</b>	<b>75%</b>	<b>75%</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>1</b>
<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah statistik sektoral dilingkup daerah provinsi</b>	<b>45 sektoral</b>	-	<b>100%</b>	<b>75%</b>	<b>75%</b>	<b>43 sektoral</b>	<b>43 sektoral</b>	<b>43 sektoral</b>	<b>1</b>
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan	4 Dokumen	-	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	1

*Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023*

	Diseminasi Data Statistik Sektoral									
Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	40 Orang	-	10%	5%	50%	40 Orang	40 Orang	40 Orang	1
Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	5 Dokumen	-	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	1
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	30 Orang	-	15%	15%	100%	30 Orang	30 Orang	30 Orang	1
Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	2 Unit	-	1 Paket	1 Paket	100%	2 Unit	2 Unit	2 Unit	1
Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah data Statistik Sektoral yang Dihimpun	5 Dokumen	-	10%	10%	100%	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	1
<b>Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi</b>	<b>Persentase Kematangan Keamanan Informasi</b>	<b>20%</b>	<b>-</b>	<b>10%</b>	<b>5%</b>	<b>50%</b>	<b>20%</b>	<b>19%</b>	<b>19%</b>	<b>0.95</b>

<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase Persandian untuk pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>20%</b>	<b>-</b>	<b>4 Kegiatan</b>	<b>3 Kegiatan</b>	<b>75%</b>	<b>20%</b>	<b>18%</b>	<b>18%</b>	<b>0.9</b>
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	3 Dokumen	-	3 Dokumen	1 Dokumen	33%	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0.67
Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	3 laporan	-	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%	3 laporan	3 laporan	3 laporan	1
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	4 Laporan	-	4 Kegiatan	3 Kegiatan	75%	3 laporan	3 laporan	3 laporan	1
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	3 Perangkat Daerah	-	20%	0%	0%	3 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	1



<b>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase Penetapan Pola hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi</b>	<b>20%</b>	<b>-</b>	<b>25%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>1</b>
Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	9 Perangkat at Daerah	-	20%	0%	0%	8 Perangkat at Daerah	8 Perangkat at Daerah	8 Perangkat at Daerah	1

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

### **a. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi**

Sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 18 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja dinas – dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang diurai dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 52 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari :

- a) Kepala Dinas;
- b) Sekretariat, membawahi:
  - 1) Sub Bagian Program
  - 2) Sub Bagian Keuangan dan Asset
  - 3) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
- c) Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik, membawahi:
  - 1) Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik
  - 2) Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publi
  - 3) Seksi Pelayanan Informasi Publik dan Kemitraan Media
- d) Bidang Aplikasi Informatika, membawahi:
  - 1) Seksi Infrastruktur dan Tata Kelola e-Government
  - 2) Seksi Pengembangan Aplikasi Informatika
  - 3) Seksi Peningkatan Sumber Daya dan Layanan Akses Informasi
- e) Bidang Persandian, membawahi:
  - 1) Seksi Tata Kelola Persandian
  - 2) Seksi Operasional Pengamanan Persandian
  - 3) Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian
- f) Bidang Statistik, membawahi:
  - 1) Seksi Pengumpulan Data Statistik
  - 2) Seksi Pengolahan dan Analisa Data Statistik
  - 3) Seksi Penyajian dan Layanan Data Statistik

## **b. Permasalahan**

Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang teknologi komunikasi dan informasi telah mempengaruhi dan membawa implikasi terhadap perubahan dan pembaharuan kehidupan masyarakat, dalam berbagai bidang. Sehingga peran informasi dan komunikasi dalam aspek kehidupan saat ini sangatlah penting.

Selain globalisasi dan perkembangan di bidang teknologi komunikasi dan informasi, agenda reformasi di bidang teknologi komunikasi dan informasi antara lain telah memberikan dampak peningkatan secara pesat dari peranan berbagai media komunikasi dan informasi sebagai sarana komunikasi dan penyebaran informasi yang paling efektif. Kini masyarakat semakin memahami dan menyadari hak – haknya untuk memperoleh informasi yang benar dan tepat waktu serta sudah merupakan suatu kewajiban pemerintah untuk menyampaikan informasi publik kepada masyarakat sejalan dengan pengembangan demokratisasi sehingga terwujudnya akuntabilitas publik, transparansi dan good governance.

Sementara itu dalam lingkup Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah, dalam proses pengelolaan informasi persandian dan statistik masih menghadapi berbagai permasalahan, antara lain masih terjadinya “kesimpangsiuran informasi” dalam penyampaian kebijakan dan aturan maupun layanan yang dikeluarkan oleh berbagai perangkat daerah, kesenjangan kemampuan memproduksi dan mendiseminasi informasi yang mengakibatkan terjadinya kesenjangan informasi antar wilayah dan penduduk di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Di bidang regulasi, masih diperlukan berbagai penataan pada bidang komunikasi, informasi, persandian dan statistik baik dari aspek infrastruktur, jaringan, sarana dan sumber daya manusia yang mampu memberikan kemudahan dan keamanan bagi para pengguna informasi sehingga terjadi pemerataan informasi.

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi, informatika, persandian dan statistik yang diharapkan memenuhi

tuntutan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan pada bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik kepada masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan menjadi transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi.

Dengan upaya pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik yang dilaksanakan maka diharapkan masyarakat akan lebih partisipatif memanfaatkan komunikasi dan informasi, pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta implementasi *e-government* dalam rangka terwujudnya reformasi birokrasi di Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah.

*E-government* yang dimaknai sebagai penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efisien, efektif dan interaktif, merupakan konsep sinergi antara penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui kesiapan infrastruktur dan sumberdaya aparatur sebagai pelayan masyarakat. Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan memerlukan dukungan ketersediaan informasi yang cepat, tepat, mudah dan akurat. Oleh karena itu, untuk mendukung kebutuhan tersebut perlu manajemen pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi yang didukung jaringan informasi dan komunikasi yang mencakup semua perangkat daerah. Seiring sejalan dengan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dengan mendasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2020 tentang uraian tugas Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Maka Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- e. Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi, dan pelaporan;
- f. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik.

Dalam rangka mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan yang didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu yang dapat dipertanggung jawabkan, mudah diakses dan dibagi pakaikan serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan. Oleh karena itu diperlukan tata kelola data yang dihasilkan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Untuk mewujudkan Satu Data Indonesia diperlukan dukungan pemerintah daerah untuk mengelola dan menghasilkan data yang akurat sehingga memenuhi standar data yang dimaksud, untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh instansi daerah dan instansi pusat guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.

Penggunaan internet bagi masyarakat modern sekarang merupakan salah satu bagian dari kebutuhan primer terutama dalam mengakses informasi. Namun dibalik kegunaan positifnya, internet juga dimungkinkan untuk tujuan negatif atau destruktif oleh pihak – pihak yang punya kemampuan baik dilakukan secara perorangan, kelompok, hingga oleh negara. Di sisi yang lain, kita masih berhadapan pada penanganan permasalahan yang belum terintegrasi dan terpadu sehingga tata kelolanya masih bersifat parsial. Hal ini menjadi ancaman

siber yang nyata, terutama bila dikaitkan dengan ancaman ketahanan dan keamanan dalam ranah siber bagi masyarakat, korporasi, dan penyelenggara pelayanan publik. Oleh karena itu pengelolaan siber mutlak dilakukan secara terpadu dan diperlukan untuk mencegah ancaman pada aspek – aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk didaerah khususnya Provinsi Sulawesi Tengah. Karena itu bidang persandian perlu dioptimalkan dalam melaksanakan peran untuk mengkoordinasikan kebijakan di bidang siber dan persandian, serta mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi pengamanan siber dan persandian di Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam rangka memperkuat bidang persandian diperlukan kewenangan yang lengkap dan jelas terkait dengan permasalahan siber dan persandian, terutama dalam mengantisipasi frekuensi serangan dan kejahatan *cyber space* yang semakin meningkat. Kejahatan – kejahatan *cyber space* atau dikenal dengan istilah *cyber crime* tersebut meliputi pencurian identitas dan data (sumber daya informasi), pembajakan akun (email, IM, social network), penyebaran *malware* dan *malicious code*, *fraud*, *spionase industry*, penyanderaan sumber daya informasi kritis serta *cyberware* atau perang di dalam dunia maya.

Informasi dewasa ini merupakan kebutuhan primer. Hadirnya teknologi informasi sangat diidamkan oleh semua pihak. Namun demikian, seringkali informasi tersebut tidak terkomunikasikan kepada pihak – pihak terkait. Kebutuhan akan informasi mutlak dibutuhkan di era modernisasi. Optimalisasi pengelolaan informasi bagi penyelenggaraan pemerintahan menjadi salah satu cara dalam meningkatkan pelayanan publik. Selain itu penguasaan Sumber daya manusia akan pengelolaan informasi terbaru, juga memberikan manfaat positif bagi penyelenggaraan pemerintahan

Adapun permasalahan – permasalahan yang dijumpai Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Peran dan Fungsi Komisi Informasi Belum Optimal;
- b. Indeks Keterbukaan Informasi Masih 73,54 Point – Sedang;
- c. Indeks Monev Keterbukaan Informasi Masih Pada Kategori Menuju Informasi - 88,98 Point Pada Tahun 2021;
- d. Indeks Kebebasan Pers Masih Berada Pada Kategori Cukup Bebas – 81,94 Point Pada Tahun 2022;
- e. Indeks Kepuasan Layanan Pengaduan Masyarakat Berbasis Elektronik Belum Terukur;
- f. Indeks Kepuasan Layanan Informasi Publik Berbasis Elektronik Belum Terukur;
- g. Belum optimalnya pemberdayaan dan pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);;
- h. Tata Kelola Penyelenggaraan Layanan SPBE Belum Optimal;
- i. Manajemen SPBE Belum Optimal;
- j. Layanan SPBE Belum Optimal;
- k. Data Sektoral Prioritas Daerah yang Dipublikasikan pada Portal Satu Data Indonesia Belum Tersedia;
- l. Data Prioritas Nasional Prov. Sulteng yang Dipublikasikan pada Portal Satu Data Indonesia Belum Tersedia;
- m. Pemanfaatan Data Sektoral Oleh Perangkat Daerah Dalam Perencanaan Dan MONEV Belum Optimal;
- n. SDM teknis Bidang Statistik yang masih minim;
- o. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Belum Optimal (Tidak Layak);
- p. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Belum Optimal (Sangat Kurang);
- q. Monitoring Dan Evaluasi – Pembinaan Dan Pengawasan Teknis Belum Optimal (Sangat Kurang);
- r. Kurangnya tenaga IT dalam penyelenggaran Persandian.

Evaluasi capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut :



**TABEL 2.2**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun				Tahun		Tahun		
			2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</b>			<b>64 Indeks</b>	<b>66 Indeks</b>	<b>68 Indeks</b>	<b>70,05 Indeks</b>	-	-	<b>100%</b>	<b>64 Indeks</b>	
<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>			<b>74 Indeks</b>	<b>80 Indeks</b>	<b>83 Indeks</b>	<b>86 Indeks</b>	-	-	<b>100%</b>	<b>74 Indeks</b>	
Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah			3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	2 Dokumen	3 Dokumen	
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-			

Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-			
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-			
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	-	1 Dokumen		
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	-	1 Laporan	1 Laporan	
<b>Jumlah Laporan Realisasi Anggaran</b>			<b>4 Laporan</b>	<b>4 Laporan</b>	<b>4 Laporan</b>	<b>4 Laporan</b>	-	-	<b>100%</b>	<b>4 Laporan</b>	
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			58 Orang/ 12 Bulan	58 Orang/ 12 Bulan	58 Orang/ 12 Bulan	58 Orang/ 12 Bulan	-	-	1 Laporan	58 Orang/ 12 Bulan	
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	-	1 Laporan	1 Laporan	
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	-	1 Laporan	1 Laporan	
<b>Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>			<b>2 Laporan</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>2 Laporan</b>	-	-	<b>100%</b>	<b>2 Laporan</b>	
Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	-	1 Laporan	1 Laporan	
Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	-	1 Dokumen	1 Laporan	
<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>			<b>80 Indeks</b>	<b>88,5 Indeks</b>	<b>90 Indeks</b>	<b>92 Indeks</b>	-	-	<b>100%</b>	<b>78 Indeks</b>	
Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan			1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	-	-		1 paket	

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	-	-		1 laporan	
Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	12 Bulan	1 Dokumen	
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	-	-		10 Orang	
Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	3 Orang	3 Orang	-	-			
Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	3 Orang	4 Orang	-	-			
<b>Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa</b>			<b>6 laporan</b>	<b>6 laporan</b>	<b>6 laporan</b>	<b>6 laporan</b>	-	-	<b>100%</b>	<b>6 laporan</b>	
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	-	-	12 Bulan	1 paket	

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			7 paket	7 paket	7 paket	7 paket	-	-	12 Bulan	7 paket	
Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	-	-	12 Bulan	1 paket	
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	-	-	12 Bulan	2 laporan	
Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-		1 Dokumen	
<b>Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>3 laporan</b>	<b>3 laporan</b>	<b>3 laporan</b>	<b>3 laporan</b>	-	-	<b>100%</b>	<b>3 laporan</b>	
Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 unit	2 unit	2 unit	-	-			
Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	-	-	1 Tahun	4 Paket	
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			25 Unit	25 Unit	25 Unit	25 Unit	-	-	1 Tahun	25 Unit	

<b>Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>1 laporan</b>	<b>1 laporan</b>	<b>1 laporan</b>	<b>1 laporan</b>	-	-	<b>100%</b>	<b>1 laporan</b>	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	-	12 Bulan	1 Laporan	
<b>Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>3 laporan</b>	<b>3 laporan</b>	<b>3 laporan</b>	<b>3 laporan</b>	-	-	<b>100%</b>	<b>3 laporan</b>	
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			28 Unit	28 Unit	28 Unit	28 Unit	-	-	12 Bulan	28 Unit	
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			1.260 Unit	1.260 Unit	1.260 Unit	1.260 Unit	-	-	12 Bulan	1.260 Unit	
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	-	1 Tahun	1 Unit	
<b>Persentase akses Layanan Informasi dan Komunikasi Publik yang transparan</b>			<b>94%</b>	<b>80%</b>	<b>85%</b>	<b>90%</b>	-	-	<b>100%</b>	<b>94%</b>	

<b>Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah</b>			<b>0.009%</b>	<b>0.013%</b>	<b>0.014%</b>	<b>0.016%</b>	-	-	<b>100%</b>	<b>0.009%</b>	
<b>Persentase terkelolanya informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah provinsi</b>			<b>40%</b>	<b>60%</b>	<b>80%</b>	<b>100%</b>	-	-	<b>100%</b>	<b>20%</b>	
Jumlah Dokumen Hasil perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik				1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-	-	2 Rancangan		
Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik			4 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	6 dokumen	-	-	4 Kegiatan	4 dokumen	
Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah				5 dokumen	5 dokumen	6 dokumen	-	-	1 Kegiatan		
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				6 dokumen	8 dokumen	10 dokumen	-	-	3 Konten		

Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik			30 dokumen	30 dokumen	40 dokumen	50 dokumen	-	-	4 Media	20 dokumen	
Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik			40 dokumen	40 dokumen	40 dokumen	40 dokumen	-	-	10 Kegiatan	40 dokumen	
Jumlah Layanan Hubungan Media			30 layanan	30 layanan	30 layanan	40 layanan	-	-	4 Media	20 layanan	
Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan			3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	4 dokumen	-	-	10 KIM	3 dokumen	
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis				2 dokumen	2 dokumen	3 dokumen	-	-	1 Kegiatan		
Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya			200 orang	200 orang	250 orang	250 orang	-	-	30 Peserta	150 orang	
Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah			2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	-	-	12 Sengketa	2 dokumen	
Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan			4 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	6 dokumen	-	-	4 Kegiatan	4 dokumen	

*Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023*



Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi			2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	-	-	5%	2 unit	
<b>Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	-	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
<b>Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	-	-		<b>100%</b>	
<b>Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan</b>			<b>5.56%</b>	<b>7.41%</b>	<b>9.26%</b>	<b>9.26%</b>	-	-		<b>30%</b>	
<b>Jumlah Nama Domain dan Subdomain yang dikelola</b>			<b>25 Domain</b>	<b>35 Domain</b>	<b>45 Domain</b>	<b>54 Domain</b>	-	-	<b>100%</b>	<b>20 Domain</b>	
Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi				35 Domain	45 Domain	54 Domain	-	-	20 Sub Domain		

*Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023*

Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah			54 Unit	54 Unit	54 Unit	54 Unit	-	-	54 OPD	54 Unit	
<b>Jumlah Perangkat Daerah yang mengelola SPBE</b>			<b>25 OPD</b>	<b>35 OPD</b>	<b>45 OPD</b>	<b>54 OPD</b>	-	-	<b>15 OPD</b>	<b>20 OPD</b>	
Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik							-	-			
Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola			7 Unit	10 Unit	15 Unit	20 Unit	-	-	3 Pusat Data	5 Unit	
Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	1 Aplikasi		
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	8 unit		
Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik				54 Perangkat Daerah	54 Perangkat Daerah	54 Perangkat Daerah	-	-	1 Aplikasi		

Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan			1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	-	1 Aplikasi	1 Unit	
Jumlah Layanan Publik Yang Terhubung Dengan Sistem Peghubung Layanan Pemerintah Daerah				2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	-	-	1 Aplikasi		
Jumlah Dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	1,38 Indeks SPBE		
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-		1 Dokumen	
Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	
<b>Persentase Cakupan Informasi / Data Statistik Sektoral</b>			<b>30%</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	-	-	<b>100%</b>	<b>30%</b>	
<b>Jumlah statistik sektoral dilingkup daerah provinsi</b>			<b>45 sektoral</b>	<b>47 sektoral</b>	<b>50 sektoral</b>	<b>53 sektoral</b>	-	-	<b>100%</b>	<b>45 sektoral</b>	

*Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023*

Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral			4 Dokumen	5 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	-	-	4 Kegiatan	4 Dokumen	
Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi			40 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	-	-	10%	40 Orang	
Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun			5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	-	-	1 Dokumen	5 Dokumen	
Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS			30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	-	-	15%	30 Orang	
Jumlah Infrastruktur Statistik			2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	-	-	1 Paket	2 Unit	
Jumlah data Statistik Sektoral yang Dihimpun			5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	-	-	10%	5 Dokumen	
<b>Persentase Kematangan Keamanan Informasi</b>			<b>20%</b>	<b>60%</b>	<b>80%</b>	<b>100%</b>	-	-	<b>10%</b>	<b>20%</b>	
<b>Persentase Persandian untuk pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi</b>			<b>20%</b>	<b>60%</b>	<b>80%</b>	<b>100%</b>	-	-	<b>4 Kegiatan</b>	<b>20%</b>	

*Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023*

Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan			3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	3 Dokumen	3 Dokumen	
Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi			3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	-	-	3 Kegiatan	3 laporan	
Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	-	-	4 Kegiatan	3 Laporan	
Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi			3 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	-	-	20%	3 Perangkat Daerah	
<b>Persentase Penetapan Pola hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi</b>			<b>20%</b>	<b>60%</b>	<b>80%</b>	<b>100%</b>	-	-	<b>25%</b>	<b>20%</b>	
Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi			9 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	11 Perangkat Daerah	-	-	20%	9 Perangkat Daerah	

*Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023*

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang baru mempunyai tantangan dan permasalahan yang dihadapi untuk meningkatkan kinerja pembangunan dibidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik adalah bagaimana meningkatkan akses, kuantitas dan kualitas meningkatkan pelayanan publik secara efisien, efektif dan interaktif. Isu tersebut merupakan konsep yang sinergi antara penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui kesiapan infrastruktur dan sumberdaya aparatur sebagai pelayan masyarakat pelayanan publik secara efisien, efektif dan interaktif, merupakan konsep yang sinergi antara penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui kesiapan infrastruktur dan sumberdaya aparatur. Adapun tantangan dan peluang dihadapi adalah sebagai berikut :

#### **a. Tantangan**

1. Pesatnya Perkembangan Teknologi Informasi;
2. Pelaksanaan Peran dan Fungsi Komisi Informasi Belum Optimal;
3. Pengelolaan PPID Utama Provinsi dan PPID Pelaksana Dan Pemanfaatannya Sebagai Media Layanan Informasi Publik Belum Optimal;
4. Pembinaan Terhadap Pengelolaan PPID Utama Kab/Kota Belum Optimal;
5. Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan Belum Optimal;
6. Pengelolaan dan Pemanfaatan Media Informasi Belum Optimal;
7. Kapasitas dan Kompetensi Sdm Pengelola Informasi Masih Rendah;
8. Tata Kelola Layanan Aduan Masyarakat Belum Optimal;
9. Survey Kepuasan Layanan Pengaduan Berbasis Elektronik Belum Dilaksanakan;
10. Survey Kepuasan Layanan Informasi Berbasis Elektronik Belum Dilaksanakan;
11. Kebijakan internal dan Pedoman pelaksanaan SPBE belum optimal;
12. Tim Koordinasi SPBE Belum Optimal;
13. Manajemen Aset TIK belum optimal;
14. Manajemen Layanan SPBE Belum tersedia;
15. Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola TIK Belum Optimal;

16. Layanan Pusat Data Belum Optimal (belum semua sistem tersimpan dan terintegrasi pada Pusat Data DKIPS);
17. Layanan Jaringan Intra Pemerintah Belum optimal (;Belum semua OPD, UPT, SMA/SMK terhubung dengan jaringan fiber optik)
18. Manajemen Pengetahuan TIK Belum Optimal;
19. Sistem Pengumpulan dan Pengolahan Data Sektorial dari Produsen Data/Perangkat Daerah (PD) Masih Manual;
20. Kualitas Data Sektorial dari Perangkat Daerah Belum Sesuai Standar SDI;
21. Cakupan Perangkat Daerah yang Mengumpulkan Data Sektorial masih Kurang;
22. Kapasitas SDM Pengumpul dan Pengolah Data pada Produsen Data/Perangkat Daerah Masih Rendah;
23. Kapasitas dan Sinergitas Forum SDI Sulteng Belum Optimal;
24. Publikasi Informasi atas Hasil Pengolahan Data Sektorial Belum Optimal;
25. Pemanfaatan Data Sektorial oleh Perangkat Daerah untuk Perencanaan dan MONEV Belum Optimal;
26. Perencanaan Keamanan Informasi Belum Tersedia;
27. Kebijakan internal Penerapan Keamanan Informasi Belum Tersedia;
28. Kapasitas Sumber daya Keamanan Informasi Masih Rendah;
29. Manajemen Pengetahuan Keamanan Informasi Belum Tersedia;
30. Informasi Publik Belum Terklasifikasi;
31. Pengamanan Teknis Sistem Elektronik Belum Tersedia;
32. Manajemen Pengamanan Sistem Elektronik Belum Tersedia;
33. Pengguna Layanan Keamanan Informasi Belum optimal;
34. Manajemen Layanan Keamanan Informasi Belum optimal;
35. Jaring Komunikasi Sandi Eksternal, Internal, Khusus Belum ditetapkan;
36. Identifikasi Pola Hubungan Komunikasi Sandi Belum Optimal;
37. Analisa Pola Hubungan Komunikasi Sandi Belum Optimal;
38. Monitoring Dan Evaluasi – Pembinaan Dan Pengawasan Teknis Belum Optimal;

## **b. Peluang**

Peluang yang dihadapi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah adalah :

1. Kepedulian pimpinan terhadap bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
2. Adanya Regulasi Bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
3. Dukungan Kebijakan Pemerintah Daerah;
4. Meningkatnya Peran Dan Fungsi Komisi Informasi Dalam Penanganan Dan Pencegahan Sengketa Informasi Publik;
5. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan PPID Utama Provinsi Sebagai Media Layanan Informasi Publik;
6. Meningkatnya Jumlah PPID Pelaksana Dengan Predikat Informatif;
7. Meningkatnya Jumlah PPID Utama Kab/Kota Dengan Predikat Informatif;
8. Meningkatnya Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan;
9. Meningkatnya Jumlah Masyarakat Mendapatkan Informasi Publik Dari Hasil Pengelolaan Dan Pemanfaatan Media Informasi;
10. Meningkatnya Jumlah Sdm Pengelola Informasi Yang Memiliki Kapasitas Dan Kompetensi;
11. Menurunnya Jumlah Aduan Masyarakat Yang Tidak Ditindaklanjuti;
12. Terlaksananya Survey Kepuasan Layanan Pengaduan Berbasis Elektronik;
13. Terlaksananya Survey Kepuasan Layanan Informasi Berbasis Elektronik;
14. Tersedianya Kebijakan internal dan Pedoman pelaksanaan SPBE
15. Meningkatnya Koordinasi Implementasi SPBE di Prov. Sulteng
16. Meningkatnya Manajemen Aset TIK.
17. Meningkatnya Manajemen Layanan SPBE.
18. Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola TIK.
19. Meningkatnya Layanan Pusat Data (Menambah dan mengintegrasikan layanan aplikasi pada Pusat Data)
20. Meningkatnya Layanan Jaringan Intra Pemerintah (menambah layanan jaringan fiber optic pada OPD< SMA/SMK dan UPT yang belum terhubung)
21. Meningkatnya Manajemen Pengetahuan Penanganan TIK.



22. Meningkatnya Sistem Pengumpulan dan Pengolahan Data Sektoral;
23. Meningkatnya Kualitas Data Sektoral yang diproduksi oleh Produsen Data/Perangkat Daerah;
24. Meningkatnya Cakupan Perangkat Daerah yang Mengumpulkan Data Sektoral;
25. Meningkatnya Kapasitas SDM Pengumpul dan Pengolah Data pada Produsen Data/Perangkat Daerah;
26. Meningkatnya Kapasitas dan Sinergitas Forum SDI Sulteng;
27. Meningkatnya Akses Informasi atas Publikasi Data Sektoral;
28. Meningkatnya Pemanfaatan Data Sektoral untuk Perencanaan dan MONEV oleh Perangkat Daerah.
29. Menyusun Rencana Strategis Pengamanan Informasi
30. Menyusun Peta Rencana Penyelenggaraan Pengamanan Informasi
31. Membuat Penetapan Arsitektur Keamanan Informasi
32. Membuat Penetapan Tata Kelola Keamanan Informasi
33. Aset Keamanan TIK Umum Meningkatkan
34. Aset Keamanan TIK Khusus Meningkatkan
35. Materil Sandi : Kunci Sandi Meningkatkan
36. APU Persandian : Jammer & Countersurveillance Meningkatkan
37. Manajemen Pengetahuan TIK Meningkatkan
38. Terklasifikasinya Informasi Publik
39. Pengamanan Teknis Sistem Elektronik Meningkatkan
40. Tersedia Manajemen Pengamanan Sistem Elektronik
41. Fungsi Identifikasi, Deteksi dan Proteksi Keamanan Informasi Meningkatkan
42. Monitoring Evaluasi Sertifikat Elektronik
43. Penyelenggaraan Pusat Operasi Pengamanan Informasi Meningkatkan
44. Tim Pengelola Keamanan Informasi Terbentuk
45. Audit Keamanan Informasi Tersedia
46. Forum komunikasi dan Koordinasi Meningkatkan
47. Pengguna Layanan Meningkatkan
48. Manajemen Layanan Meningkatkan
49. Jaring Komunikasi Sandi Eksternal, Internal, Khusus Tersedia

50. Peraturan/Keputusan Instansi Pemerintah Tersedia
51. Identifikasi Pola Hubungan Komunikasi Sandi Meningkat
52. Analisis Pola Hubungan Komunikasi Sandi Meningkat
53. Monitoring Dan Evaluasi – Pembinaan Dan Pengawasan Teknis Meningkat

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Telaah terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2023 dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik dengan hasil pencapaian target tahunan.

Rancangan awal Renja yang telah disusun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik. Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik yang dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Disamping itu dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta indikator kinerja dan rencana capaiannya. Usulan program dan kegiatan dalam Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik senantiasa diselaraskan dengan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) (*Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Provinsi Sulawesi Tengah*).

**TABEL 2.3**  
**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023**

**Perangkat Daerah : Dinas**

**Periode / Tahun : 2023**

<b>N o.</b>	<b>Program / Kegiatan</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Targe t Capai an</b>	<b>Pagu Indikatif (Rp)</b>	<b>Program / Kegiatan</b>	<b>Lokasi</b>	<b>indikator Kinerja</b>	<b>Targe t Capai an</b>	<b>Kebutuha n Dana (Rp)</b>	<b>Cata tan Pent ing</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>		<b>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</b>	<b>64 Indeks</b>	<b>10.093.993.797</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>		<b>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</b>	<b>64 Indeks</b>	<b>10.093.993.797</b>	
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>	<b>74 Indeks</b>	<b>437.277.000</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>	<b>74 Indeks</b>	<b>437.277.000</b>	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	3 Dokumen	258.716.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	3 Dokumen	258.716.000	

*Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023*

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	113.715.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	113.715.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	-	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	-	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	-	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	-	

*Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023*

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	-	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	64.846.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	64.846.000	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Laporan Realisasi Anggaran</b>	<b>4 Laporan</b>	<b>7.326.211.452</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Laporan Realisasi Anggaran</b>	<b>4 Laporan</b>	<b>7.326.211.452</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/ 12 Bulan	6.501.267.452	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/ 12 Bulan	6.501.267.452	

	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	766.779.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	766.779.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	16.950.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	16.950.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 Laporan	41.215.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 Laporan	41.215.000	
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>94.175.000</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>94.175.000</b>	

*Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023*

	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	63.075.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	63.075.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	31.100.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	31.100.000	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>78 Indeks</b>	<b>201.655.000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>78 Indeks</b>	<b>201.655.000</b>	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	97.860.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	97.860.000	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 laporan	12.575.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 laporan	12.575.000	

	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	63.000.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	63.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	28.220.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	28.220.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	-	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	-	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	-	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	-	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa</b>	<b>6 laporan</b>	<b>840.378.125</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa</b>	<b>6 laporan</b>	<b>840.378.125</b>	



	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	10.406.825	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	10.406.825	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 paket	146.237.400	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 paket	146.237.400	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	18.787.900	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	18.787.900	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Morowali, Bahodopi, Bahodopi Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 laporan	650.396.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Morowali, Bahodopi, Bahodopi Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 laporan	650.396.000	

*Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023*

	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	14.550.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	14.550.000	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>3 laporan</b>	<b>251.494.167</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>3 laporan</b>	<b>251.494.167</b>	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 unit	-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 unit	-	
	Pengadaan Mebel	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	31.410.000	Pengadaan Mebel	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	31.410.000	

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	220.084.167	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	220.084.167	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1 laporan</b>	<b>247.203.053</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1 laporan</b>	<b>247.203.053</b>	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	247.203.053	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	247.203.053	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3 laporan</b>	<b>695.600.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3 laporan</b>	<b>695.600.000</b>	

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	28 Unit	406.500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	28 Unit	406.500.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1.260 Unit	39.100.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1.260 Unit	39.100.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	250.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	250.000.000	
<b>Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik</b>		<b>Persentase akses Layanan Informasi dan Komunikasi Publik yang transparan</b>	<b>94%</b>	<b>4.050.631.303</b>	<b>Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik</b>		<b>Persentase akses Layanan Informasi dan Komunikasi Publik yang transparan</b>	<b>94%</b>	<b>4.050.631.303</b>	

			<b>Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah</b>	<b>0,009 %</b>				<b>Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah</b>	<b>0,009 %</b>		
	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi</b>		<b>Persentase terkelolanya informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah provinsi</b>	<b>40%</b>	<b>4.050.631.303</b>	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi</b>		<b>Persentase terkelolanya informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah provinsi</b>	<b>40%</b>	<b>4.050.631.303</b>	
	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1 dokumen	-	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1 dokumen	-	
	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	4 dokumen	143.305.850	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	4 dokumen	143.305.850	

*Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023*

	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	4 dokumen	-	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	4 dokumen	-	
	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	6 dokumen	-	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	6 dokumen	-	
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	40 dokumen	1.983.301.123	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	40 dokumen	1.983.301.123	
	Pelayanan Informasi Publik	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	40 dokumen	244.625.000	Pelayanan Informasi Publik	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	40 dokumen	244.625.000	

Layanan Hubungan Media	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Layanan Hubungan Media	30 layanan	549.895.000	Layanan Hubungan Media	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Layanan Hubungan Media	30 layanan	549.895.000	
Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	3 dokumen	129.300.000	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	3 dokumen	129.300.000	
Manajemen Komunikasi Krisis	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	1 dokumen	-	Manajemen Komunikasi Krisis	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	1 dokumen	-	
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	200 orang	59.325.000	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	200 orang	59.325.000	
Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	2 dokumen	545.000.000	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	2 dokumen	545.000.000	

	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	4 dokumen	244.664.000	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	4 dokumen	244.664.000	
	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	2 unit	151.215.330	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	2 unit	151.215.330	
	<b>Program Pengelolaan Aplikasi Informatika</b>		<b>Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo</b>	<b>100 %</b>	<b>6.300.017.400</b>	<b>Program Pengelolaan Aplikasi Informatika</b>		<b>Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo</b>	<b>100 %</b>	<b>6.300.017.400</b>	



Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100 %		Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100 %		
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan	5.56 %				Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan	30%		
		Jumlah Nama Domain dan Subdomain yang dikelola	25 Domain	5.137.633.400			Jumlah Nama Domain dan Subdomain yang dikelola	20 Domain	5.137.633.400	
Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi		Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	20 Domain	-	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi		Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	20 Domain	-	

	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	54 Unit	5.137.633.400	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	54 Unit	5.137.633.400	
	<b>Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</b>		<b>Jumlah Perangkat Daerah yang mengelola SPBE</b>	<b>20 OPD</b>	<b>1.162.384.000</b>	<b>Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</b>		<b>Jumlah Perangkat Daerah yang mengelola SPBE</b>	<b>20 OPD</b>	<b>1.162.384.000</b>	
	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik		Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dokumen	-	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik		Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dokumen	-	
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	7 Unit	511.396.000	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	7 Unit	511.396.000	

	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 Dokumen	-	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 Dokumen	-	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	1 Dokumen	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	1 Dokumen	-	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik		Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	54 Perangkat Daerah	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik		Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	54 Perangkat Daerah	-	
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	1 Unit	201.155.000	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	1 Unit	201.155.000	

Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Layanan Publik Yang Terhubung Dengan Sistem Peghubung Layanan Pemerintah Daerah	2 Layan an	-	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Layanan Publik Yang Terhubung Dengan Sistem Peghubung Layanan Pemerintah Daerah	2 Layan an	-	
Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	1 Doku men	-	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	1 Doku men	-	
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Doku men	193.845.000	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Doku men	193.845.000	
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1 Doku men	255.988.000	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1 Doku men	255.988.000	

	<b>Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>		<b>Persentase Cakupan Informasi / Data Statistik Sektoral</b>	<b>30%</b>	<b>756.544.800</b>	<b>Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>		<b>Persentase Cakupan Informasi / Data Statistik Sektoral</b>	<b>30%</b>	<b>756.544.800</b>	
	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi</b>		<b>Jumlah statistik sektoral dilingkup daerah provinsi</b>	<b>45 sektoral</b>	<b>756.544.800</b>	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi</b>		<b>Jumlah statistik sektoral dilingkup daerah provinsi</b>	<b>45 sektoral</b>	<b>756.544.800</b>	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	4 Dokumen	417.437.700	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	4 Dokumen	417.437.700	
	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	40 Orang	123.826.300	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	40 Orang	123.826.300	

	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	5 Dokumen	24.900.000	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	5 Dokumen	24.900.000	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kab. Poso, Poso Kota, Kayam anyu Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	30 Orang	121.034.300	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kab. Poso, Poso Kota, Kayam anyu Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	30 Orang	121.034.300	
	Pengembangan Infrastruktur	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Infrastruktur Statistik	2 Unit	32.217.500	Pengembangan Infrastruktur	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Infrastruktur Statistik	2 Unit	32.217.500	
	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah data Statistik Sektoral yang Dihimpun	5 Dokumen	37.129.000	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah data Statistik Sektoral yang Dihimpun	5 Dokumen	37.129.000	

	<b>Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi</b>		<b>Persentase Kematangan Keamanan Informasi</b>	<b>20%</b>	<b>695.080.000</b>	<b>Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi</b>		<b>Persentase Kematangan Keamanan Informasi</b>	<b>20%</b>	<b>695.080.000</b>	
	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi</b>		<b>Persentase Persandian untuk pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>20%</b>	<b>604.491.000</b>	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi</b>		<b>Persentase Persandian untuk pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>20%</b>	<b>604.491.000</b>	
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	3 Dokumen	67.476.000	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	3 Dokumen	67.476.000	
	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	3 laporan	288.491.000	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	3 laporan	288.491.000	

	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	4 Laporan	98.466.000	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	4 Laporan	98.466.000	
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	3 Perangkat Daerah	150.058.000	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	3 Perangkat Daerah	150.058.000	
	<b>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi</b>		<b>Persentase Penetapan Pola hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi</b>	<b>20%</b>	<b>90.589.000</b>	<b>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi</b>		<b>Persentase Penetapan Pola hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi</b>	<b>20%</b>	<b>90.589.000</b>	
	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	9 Perangkat Daerah	90.589.000	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	9 Perangkat Daerah	90.589.000	

*Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023*



## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan MUSRENBANGNAS Tingkat Provinsi

## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

#### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Mengacu pada permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang telah dikemukakan di atas perlu diselesaikan dalam jangka menengah dan berpijak pada prioritas pembangunan dalam RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah, RPJMN Tahun 2020-2024 dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Nawacita dan Trisakti dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah, maka visi pembangunan provinsi Sulawesi Tengah periode 2021 – 2026 sebagai berikut:

**“GERAK CEPAT MENUJU SULAWESI TENGAH LEBIH SEJAHTERA DAN LEBIH MAJU”**

Untuk mewujudkan visi pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mengacu pada Misi ke 2 (dua) yaitu:

***1. Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supremasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM***

Sumber daya dan kebijakan akan diprioritaskan untuk menjamin implementasi dari prioritas pembangunan daerah berdasarkan Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, maka dirumuskan agenda prioritas daerah yang di implementasikan dalam program aksi sebagai berikut:

**Prioritas ke 3 (tiga)** : Menyediakan Infrastruktur untuk mendorong Sulteng sebagai daerah penyanggah bagi ibukota baru

Dengan **Program Aksi** : Fasilitasi ketersediaan akses informasi dan komunikasi serta data yang dapat dijadikan dasar informasi perencanaan dan investasi dari pihak swasta

serta didukung sistem pengamanan informasi yang akurat.

Perlu dilakukan pengembangan secara bertahap dan terencana, khususnya pengembangan kontens Sistem Aplikasi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam satu *Network Operating Center* (NOC) guna peningkatan Pelayanan Publik. Jaringan ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh Pejabat Struktural, Fungsional dan Staf dalam lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan masyarakat, kalangan bisnis serta menjadikan Teknologi Informasi sebagai kebutuhan pokok dalam menunjang tugas aparatur di segala bidang.

Adapun harapan yang diinginkan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Menjadikan *local government* Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Pengelola dan Koordinator Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Pusat Database atau Data center, dimana semua Lembaga/Institusi baik Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dapat terkoneksi dalam satu *Network Operating Center (NOC)*;
- b) Adanya pengembangan Sarana dan Prasarana Fasilitas Publik bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang dapat langsung dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga percepatan informasi dapat berjalan secara signifikan;
- c) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang Komunikasi dan Informatika serta Sosialisasi Informasi Teknologi (IT) dengan target sasaran Aparatur Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Swasta dan Masyarakat serta Komunitas Informasi Teknologi (IT) dalam lingkup Provinsi Sulawesi Tengah;
- d) Adanya pembinaan dan pengaturan penggunaan sarana dan prasarana Telematika di wilayah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sesuai Peraturan Perundang-undangan;
- e) Adanya sosialisasi dan pembinaan penyelenggaraan Telematika secara berkesinambungan;
- f) Pengembangan Infrastruktur Telematika sampai ke tingkat Kelurahan guna penjaringan data dapat dilakukan secara *online* dalam waktu relatif cepat dan efisien;

- g) Masyarakat dapat memahami tata cara penyampaian aspirasi, permintaan informasi dan aduan melalui aplikasi Laporan!;
- h) Terbentuknya KIM di setiap kecamatan;
- i) Badan Publik dapat menyediakan informasi publik melalui kanal-kanal resmi;
- j) Pengembangan konten *website* Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang meliputi Sistem Aplikasi Satuan Kerja Perangkat Daerah baik secara Intranet maupun Internet;
- k) Pengembangan implementasi *e-Government* di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;
- l) Adanya payung Hukum sebagai regulasi perencanaan pembangunan dan pengembangan sarana Teknologi Informasi;
- m) Penyelenggara Sistem Elektronik yang menyelenggarakan Sistem Elektronik harus menerapkan pedoman Indeks Keamanan Informasi;
- n) Layanan Keamanan Informasi;
- o) pemenuhan data statistik sektoral yang cepat, akurat, dan akuntabel sebagai pendukung perencanaan pembangunan di Provinsi Sulawesi Tengah maupun sebagai layanan kepada masyarakat;
- p) Terselenggaranya otorisasi statistik sektoral di daerah;
- q) Pembangunan Portal Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi yang terintegrasi dengan Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten/Kota.

Dalam tatanan kehidupan sosial yang sehat sebagai acuan untuk mendukung arah kebijakan yang jelas dan terarah serta rencana program, perlu disusun strategi yang akan memberikan gambaran upaya-upaya untuk dapat tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Faktor internal dalam kaitan dengan perencanaan strategis selalu dikaitkan dengan analisis pelaku di dalam wilayah perencanaan itu sendiri. Suatu sumber daya internal dikatakan sebagai kekuatan jika memiliki keunggulan kompetitif dan menjadi faktor pendukung potensial terhadap pencapaian tujuan, sebaliknya sumber daya internal tersebut digolongkan sebagai kelemahan jika mempunyai kondisi potensi yang kurang/tidak mendukung pencapaian Visi dan Misi

### **3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah**

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi.

Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan - tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik dan membantu Gubernur dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang urusan komunikasi, informatika, persandian dan statistik. Untuk itu berdasarkan visi dan misi Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah yang selaras dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2022 – 2026 serta sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 – 2026, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

#### **3.2.1 Tujuan**

Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 bertujuan:

- a. Meningkatkan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi;

Dengan indikator tujuan :

- a. Indeks SPBE

### 3.2.2 Sasaran

Sedangkan sasaran Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

1. Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik;
2. Meningkatnya Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
3. Terciptanya data Statistik sektoral yang berkualitas;
4. Meningkatnya pengamanan informasi Pemerintah daerah melalui penyelenggaraan Persandian;

Indikator sasaran Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

- 1) Sasaran 1 memiliki 1 indikator :
  - Indeks layanan komunikasi publik yang informatif
- 2) Sasaran 2 memiliki 1 indikator :
  - Cakupan Layanan Data Center
- 3) Sasaran 3 memiliki 1 indikator :
  - Cakupan Data Statistik Sektoral
- 4) Sasaran 4 memiliki 1 indikator :
  - Cakupan Layanan Keamanan Informasi

### 3.3 Program Dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2023 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2026

Program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2023.

Adapun analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 adalah sebagaimana tabel berikut:

**TABEL 3.1**  
**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023**  
**DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024 PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**Perangkat Daerah :  
 Periode / Tahun : 2023  
 Prakiraan Maju : 2024**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>16.01</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</b>		<b>64 Indeks</b>	<b>10.093.993.797</b>	DAU		<b>66 Indeks</b>	<b>12.425.846.132</b>
<b>16.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>		<b>74 Indeks</b>	<b>437.277.000</b>	DAU		<b>80 Indeks</b>	<b>234.411.200</b>
2.16.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	3 Dokumen	258.716.000	DAU		3 Dokumen	87.080.000

2.16.01.1.0 1.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	1 Dokumen	113.715.000	DAU		1 Dokumen	12.360.000
2.16.01.1.0 1.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	1 Dokumen		DAU		1 Dokumen	12.360.000
2.16.01.1.0 1.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	1 Dokumen		DAU		1 Dokumen	12.360.000
2.16.01.1.0 1.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	1 Dokumen		DAU		1 Dokumen	6.180.000



2.16.01.1.0 1.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	1 Laporan		DAU		1 Laporan	6.180.000
2.16.01.1.0 1.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	1 Laporan	64.846.000	DAU		1 Laporan	97.891.200
<b>16.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Realisasi Anggaran</b>		<b>4 Laporan</b>	<b>7.326.211.452</b>	DAU		<b>4 Laporan</b>	<b>8.961.789.648</b>
2.16.01.1.0 2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	58 Orang/12 Bulan	6.501.267.452	DAU		58 Orang/12 Bulan	7.495.541.008
2.16.01.1.0 2.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Palu, Palu Timur,	1 Dokumen	766.779.000	DAU		1 Dokumen	1.427.876.640

*Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023*

			Lolu Selatan						
2.16.01.1.0 2.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	1 Laporan	16.950.000	DAU		1 Laporan	10.438.400
2.16.01.1.0 2.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	1 Laporan	41.215.000	DAU		1 Laporan	27.933.600
<b>16.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>		<b>2 Laporan</b>	<b>94.175.000</b>	DAU		<b>2 Laporan</b>	<b>34.954.080</b>

2.16.01.1.0 3.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	1 Laporan	63.075.000	DAU		1 Laporan	18.540.000
2.16.01.1.0 3.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	1 Laporan	31.100.000	DAU		1 Laporan	16.414.080
<b>16.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>		<b>78 Indeks</b>	<b>201.655.000</b>	DAU		<b>88,5 Indeks</b>	<b>384.919.658</b>
2.16.01.1.0 5.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	1 paket	97.860.000	DAU		1 paket	111.240.000
2.16.01.1.0 5.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	1 laporan	12.575.000	DAU		1 laporan	24.720.000

2.16.01.1.0 5.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	1 Dokum en	63.000.000	DAU		1 Dokum en	61.182.000
2.16.01.1.0 5.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	10 Orang	28.220.000	DAU		10 Orang	127.700.000
2.16.01.1.0 5.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	3 Orang		DAU		3 Orang	12.360.000
2.16.01.1.0 5.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	2 Orang		DAU		3 Orang	47.717.658
<b>16.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa</b>		<b>6 lapora n</b>	<b>840.378.12 5</b>	DAU		<b>6 lapora n</b>	<b>1.917.400.614</b>

2.16.01.1.0 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	1 paket	10.406.825	DAU		1 paket	16.385.893
2.16.01.1.0 6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	7 paket	146.237.400	DAU		7 paket	852.540.270
2.16.01.1.0 6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	1 paket	18.787.900	DAU		1 paket	32.853.251
2.16.01.1.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Morowali, Bahodopi, Bahodopi Kota Palu, Palu Timur,	2 laporan	650.396.000	DAU		2 laporan	990.901.200

			Lolu Selatan						
2.16.01.1.0 6.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	1 Dokumen	14.550.000	DAU		1 Dokumen	24.720.000
<b>16.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>3 laporan</b>	<b>251.494.167</b>	DAU		<b>3 laporan</b>	<b>331.172.117</b>
2.16.01.1.0 7.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	3 unit		DAU		2 unit	39.140.000
2.16.01.1.0 7.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Palu, Palu	4 Paket	31.410.000	DAU		4 Paket	246.918.038

*Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023*

			Timur, Lolu Selatan						
2.16.01.1.0 7.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	25 Unit	220.084.16 7	DAU		25 Unit	37.286.079
<b>16.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>1 lapora n</b>	<b>247.203.05 3</b>	DAU		<b>1 lapora n</b>	<b>296.643.696</b>
2.16.01.1.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	1 Lapora n	247.203.05 3	DAU		1 Lapora n	296.643.696
<b>16.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>3 lapora n</b>	<b>695.600.00 0</b>	DAU		<b>3 lapora n</b>	<b>264.555.121</b>

2.16.01.1.0 9.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	28 Unit	406.500.000	DAU		28 Unit	175.512.000
2.16.01.1.0 9.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	1.260 Unit	39.100.000	DAU		1260 Unit	37.773.841
2.16.01.1.0 9.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	1 Unit	250.000.000	DAU		1 Unit	37.773.841
<b>16.02</b>	<b>Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik</b>	<b>Persentase akses Layanan Informasi dan Komunikasi Publik yang transparan</b>		<b>94%</b>	<b>4.050.631.303</b>	DAU		<b>80%</b>	<b>1.805.421.505</b>



		<b>Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah</b>		<b>0,009 %</b>				<b>0,013 %</b>	
<b>16.02.1.01</b>	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase terkelolanya informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah provinsi</b>		<b>40%</b>	<b>4.050.631.303</b>	DAU		<b>60%</b>	<b>1.805.421.505</b>
2.16.2.1.01.1	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	1 dokumen		DAU		1 dokumen	57.802.800
2.16.2.1.01.2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	4 dokumen	143.305.850	DAU		5 dokumen	5.082.000

2.16.2.1.01.3	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah		4 dokumen	-		DAU	5 dokumen	63.621.628
2.16.2.1.01.4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik		6 dokumen			DAU	6 dokumen	100.735.030
2.16.2.1.01.5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	30 dokumen	1.983.301.123		DAU	30 dokumen	265.981.797
2.16.2.1.01.6	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	40 dokumen	244.625.000		DAU	40 dokumen	254.067.000
2.16.2.1.01.7	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	30 layanan	549.895.000		DAU	30 layanan	220.000.000

*Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023*

2.16.2.1.01.8	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	3 dokumen	129.300.000	DAU		3 dokumen	171.930.000
2.16.2.1.01.9	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	1 dokumen		DAU		2 dokumen	12.045.000
2.16.2.1.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	200 orang	59.325.000	DAU		200 orang	136.840.000
2.16.2.1.01.11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	2 dokumen	545.000.000	DAU		2 dokumen	440.000.000

2.16.2.1.01. 12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	4 dokumen	244.664.000	DAU		5 dokumen	58.410.000
2.16.2.1.01. 13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	2 unit	151.215.330	DAU		2 unit	18.906.250
<b>16.03</b>	<b>Program Pengelolaan Aplikasi Informatika</b>	<b>Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo</b>		<b>100%</b>	<b>6.300.017.400</b>	DAU		<b>100%</b>	<b>9.374.494.577</b>
		<b>Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi</b>		<b>100%</b>				<b>100%</b>	

		<b>Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan</b>		<b>5,56%</b>				<b>7,41%</b>	
<b>16.03.1.01</b>	<b>Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah Nama Domain dan Subdomain yang dikelola</b>		<b>25 Domain</b>	<b>5.137.633.400</b>	DAU		<b>35 Domain</b>	<b>7.308.494.577</b>
2.16.2.1.01.1	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi		25 Domain		DAU		35 Domain	77.000.000
2.16.2.1.01.3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	54 Unit	5.137.633.400	DAU		54 Unit	7.231.494.577

<b>16.03.1.02</b>	<b>Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah Perangkat Daerah yang mengelola SPBE</b>		<b>20 OPD</b>	<b>1.162.384.000</b>	DAU		<b>35 OPD</b>	<b>2.066.000.000</b>
2.16.03.1.0 2.2	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik		1 Dokumen		DAU			
2.16.03.1.0 2.3	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	7 Unit	511.396.000	DAU		10 Unit	1.230.000.000
2.16.03.1.0 2.4	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah		1 Dokumen		DAU		1 Dokumen	110.000.000
2.16.03.1.0 2.5	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi		1 Dokumen		DAU		1 Dokumen	66.000.000

2.16.03.1.0 2.6	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik		54 Perang kat Daerah		DAU		54 Perang kat Daerah	110.000.000
2.16.03.1.0 2.7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	1 Unit	201.155.00 0	DAU		1 Unit	110.000.000
2.16.03.1.0 2.8	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik Yang Terhubung Dengan Sistem Peghubung Layanan Pemerintah Daerah	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	2 Layana n		DAU		2 Layana n	220.000.000
2.16.03.1.0 2.9	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	1 Dokum en		DAU		1 Dokum en	110.000.000

2.16.03.1.0 2.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	1 Dokumen	193.845.000	DAU	1 Dokumen	55.000.000
2.16.03.1.0 2.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	1 Dokumen	255.988.000	DAU	1 Dokumen	55.000.000
<b>20.02</b>	<b>Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>	<b>Persentase Cakupan Informasi / Data Statistik Sektoral</b>		<b>30%</b>	<b>756.544.800</b>	DAU	<b>20%</b>	<b>940.323.701</b>
<b>20.02.1.01</b>	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah statistik sektoral dilingkup daerah provinsi</b>		<b>45 sektoral</b>	<b>756.544.800</b>	DAU	<b>47 sektoral</b>	<b>940.323.701</b>
2.20.2.1.01. 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	4 Dokumen	417.437.700	DAU	5 Dokumen	255.323.701

*Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023*



2.20.2.1.01.2	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	40 Orang	123.826.300	DAU		40 Orang	150.000.000
2.20.2.1.01.3	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	5 Dokumen	24.900.000	DAU		5 Dokumen	110.000.000
2.20.2.1.01.4	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	Kab. Poso, Poso Kota, Kayamanya Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	30 Orang	121.034.300	DAU		30 Orang	150.000.000
2.20.2.1.01.5	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	Kota Palu, Palu Timur,	2 Unit	32.217.500	DAU		2 Unit	110.000.000

*Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023*

			Lolu Selatan						
2.20.2.1.01.6	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah data Statistik Sektoral yang Dihimpun	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	5 Dokumen	37.129.000	DAU		5 Dokumen	165.000.000
<b>21.02</b>	<b>Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi</b>	<b>Persentase Kematangan Keamanan Informasi</b>		<b>20%</b>	<b>695.080.000</b>	DAU		<b>60%</b>	<b>827.484.856</b>
<b>21.02.1.01</b>	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase Persandian untuk pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi</b>		<b>20%</b>	<b>604.491.000</b>	DAU		<b>60%</b>	<b>629.484.856</b>
2.21.2.1.01.1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	3 Dokumen	67.476.000	DAU		3 Dokumen	103.684.856

2.21.2.1.01. 2	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	3 laporan	288.491.000	DAU		3 Laporan	275.000.000
2.21.2.1.01. 3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	4 Laporan	98.466.000	DAU		4 Laporan	110.000.000
2.21.2.1.01. 4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	3 Perangkat Daerah	150.058.000	DAU		3 Perangkat Daerah	140.800.000
<b>21.02.1.02</b>	<b>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase Penetapan Pola hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi</b>		<b>20%</b>	<b>90.589.000</b>	DAU		<b>60%</b>	<b>198.000.000</b>

2.21.2.1.02. 1	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	9 Perang kat Daerah	90.589.000	DAU	10 Perang kat Daerah	198.000.000
-------------------	---	--	-------------------------------------	------------------------------	------------	-----	-------------------------------	-------------

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran dan tujuan dalam rangka mendukung pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. Adapun yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, process, outputs, outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan pada Rencana Kerja Perubahan (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2023 tercantum dalam Tabel berikut:

**TABEL 4.1**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**  
**PERIODE 2023**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2023			
						Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatkan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Capaian Indeks Reformasi Birokrasi	<b>16.01</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>64 Indeks</b>	<b>10.093.993.797</b>	<b>Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah</b>	
	Capaian Nilai SAKIP	<b>16.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>74 Indeks</b>	<b>437.277.000</b>		

*Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023*

		2.16.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	3 Dokumen	258.716.000		Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
		2.16.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	113.715.000		Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
		2.16.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen			Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
		2.16.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen			Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan

		2.16.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dokumen			Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
		2.16.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Laporan			Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
		2.16.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	64.846.000		Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
		<b>16.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Realisasi Anggaran</b>	<b>100%</b>	<b>4 Laporan</b>	<b>7.326.211.452</b>		
		2.16.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Laporan	58 Orang/12 Bulan	6.501.267.452		Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan



		2.16.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	766.779.000		Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
		2.16.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	16.950.000		Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
		2.16.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	41.215.000		Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
		<b>16.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>94.175.000</b>		

		2.16.01.1. 03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	63.075.00 0		Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
		2.16.01.1. 03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	1 Laporan	31.100.00 0		Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat	<b>16.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>100%</b>	<b>78 Indeks</b>	<b>201.655.000</b>		
		2.16.01.1. 05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		1 paket	97.860.00 0		Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
		2.16.01.1. 05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		1 laporan	12.575.00 0		Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
		2.16.01.1. 05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Bulan	1 Dokumen	63.000.00 0		Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan

		2.16.01.1. 05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		10 Orang	28.220.00 0		Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
		2.16.01.1. 05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		3 Orang			Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
		2.16.01.1. 05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		2 Orang			Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
		<b>16.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa</b>	<b>100%</b>	<b>6 laporan</b>	<b>840.378.1 25</b>		
		2.16.01.1. 06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Bulan	1 paket	10.406.82 5		Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan

		2.16.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Bulan	7 paket	146.237.400		Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
		2.16.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Bulan	1 paket	18.787.900		Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
		2.16.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	2 laporan	650.396.000		Kab. Morowali, Bahodopi, Bahodopi Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
		2.16.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		1 Dokumen	14.550.000		Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
		<b>16.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>3 laporan</b>	<b>251.494.167</b>		

		2.16.01.1. 07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		3 unit			Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
		2.16.01.1. 07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Tahun	4 Paket	31.410.000		Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
		2.16.01.1. 07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Tahun	25 Unit	220.084.167		Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
		<b>16.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1 laporan</b>	<b>247.203.053</b>		
		2.16.01.1. 08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	1 Laporan	247.203.053		Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan

		<b>16.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>3 laporan</b>	<b>695.600.000</b>		
		2.16.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12 Bulan	28 Unit	406.500.000		Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
		2.16.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Bulan	1.260 Unit	39.100.000		Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
		2.16.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Tahun	1 Unit	250.000.000		Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	<b>16.02</b>	<b>Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik</b>	<b>Persentase akses Layanan Informasi dan Komunikasi Publik yang transparan</b>	<b>100%</b>	<b>94%</b>	<b>4.050.631.303</b>		

*Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023*

				<b>Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah</b>	<b>100%</b>	<b>0,009 %</b>			
		<b>16.02.1.01</b>	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase terkelolanya informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah provinsi</b>	<b>100%</b>	<b>40%</b>	<b>4.050.631.303</b>		
		2.16.2.1.0 1.1	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	2 Rancang an	1 dokum en			Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
		2.16.2.1.0 1.2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	4 Kegiatan	4 dokum en	143.305.8 50		Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan

		2.16.2.1.0 1.3	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Kegiatan	4 dokumen	-		
		2.16.2.1.0 1.4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	3 Konten	6 dokumen			
		2.16.2.1.0 1.5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	4 Media	30 dokumen	1.983.301.123		Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
		2.16.2.1.0 1.6	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	10 Kegiatan	40 dokumen	244.625.000		Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
		2.16.2.1.0 1.7	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	4 Media	30 layanan	549.895.000		Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
		2.16.2.1.0 1.8	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	10 KIM	3 dokumen	129.300.000		Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan



		2.16.2.1.0 1.9	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	1 Kegiatan	1 dokumen			Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
		2.16.2.1.0 1.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	30 Peserta	200 orang	59.325.000		Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
		2.16.2.1.0 1.11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	12 Sengketa	2 dokumen	545.000.000		Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
		2.16.2.1.0 1.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	4 Kegiatan	4 dokumen	244.664.000		Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
		2.16.2.1.0 1.13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	5%	2 unit	151.215.330		Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan

	Meningkatnya Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	<b>16.03</b>	<b>Program Pengelolaan Aplikasi Informatika</b>	<b>Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>6.300.017.400</b>		
				<b>Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi</b>		<b>100%</b>			
				<b>Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan</b>		<b>5.56%</b>			

		<b>16.03.1.01</b>	<b>Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah Nama Domain dan Subdomain yang dikelola</b>	<b>100%</b>	<b>25 Domain</b>	<b>5.137.633.400</b>		
		2.16.2.1.0 1.1	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	20 Sub Domain	25 Domain			
		2.16.2.1.0 1.3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	54 OPD	54 Unit	5.137.633.400		Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
		<b>16.03.1.02</b>	<b>Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah Perangkat Daerah yang mengelola SPBE</b>	<b>15 OPD</b>	<b>20 OPD</b>	<b>1.162.384.000</b>		
		2.16.03.1. 02.2	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik		1 Dokumen			
		2.16.03.1. 02.3	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	3 Pusat Data	7 Unit	511.396.000		Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan

*Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023*

		2.16.03.1. 02.4	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 Aplikasi	1 Dokumen			
		2.16.03.1. 02.5	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	8 unit	1 Dokumen			
		2.16.03.1. 02.6	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	1 Aplikasi	54 Perangkat Daerah			
		2.16.03.1. 02.7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	1 Aplikasi	1 Unit	201.155.000		Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
		2.16.03.1. 02.8	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik Yang Terhubung Dengan Sistem Peghubung Layanan Pemerintah Daerah	1 Aplikasi	2 Layanan			Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan

*Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023*

		2.16.03.1.02.9	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	1,38 Indeks SPBE	1 Dokumen			Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
		2.16.03.1.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		1 Dokumen	193.845.000		Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
		2.16.03.1.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen	1 Dokumen	255.988.000		Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
	Terciptanya data Statistik sektoral yang berkualitas	<b>20.02</b>	<b>Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>	<b>Persentase Cakupan Informasi / Data Statistik Sektoral</b>	<b>100%</b>	<b>30%</b>	<b>756.544.800</b>		

		<b>20.02.1.01</b>	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah statistik sektoral dilingkup daerah provinsi</b>	<b>100%</b>	<b>45 sektoral</b>	<b>756.544.800</b>		
		2.20.2.1.0 1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	4 Kegiatan	4 Dokumen	417.437.700		Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
		2.20.2.1.0 1.2	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	10%	40 Orang	123.826.300		Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
		2.20.2.1.0 1.3	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	5 Dokumen	24.900.000		Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
		2.20.2.1.0 1.4	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	15%	30 Orang	121.034.300		Kab. Poso, Poso Kota, Kayamanya Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan

		2.20.2.1.0 1.5	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	1 Paket	2 Unit	32.217.50 0		Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
		2.20.2.1.0 1.6	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah data Statistik Sektoral yang Dihimpun	10%	5 Dokumen	37.129.00 0		Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
	Meningkatnya pengamanan informasi Pemerintah daerah melalui penyelenggaraan Persandian	<b>21.02</b>	<b>Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi</b>	<b>Persentase Kematangan Keamanan Informasi</b>	<b>10%</b>	<b>20%</b>	<b>695.080.000</b>		
		<b>21.02.1.01</b>	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase Persandian untuk pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>4 Kegiatan</b>	<b>20%</b>	<b>604.491.000</b>		
		2.21.2.1.0 1.1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	3 Dokumen	3 Dokumen	67.476.00 0		Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan

*Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023*

		2.21.2.1.0 1.2	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	3 Kegiatan	3 laporan	288.491.000		Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
		2.21.2.1.0 1.3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	4 Kegiatan	4 Laporan	98.466.000		Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
		2.21.2.1.0 1.4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	20%	3 Perangkat Daerah	150.058.000		Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
		<b>21.02.1.02</b>	<b>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase Penetapan Pola hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi</b>	<b>25%</b>	<b>20%</b>	<b>90.589.000</b>		



		2.21.2.1.0 2.1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	20%	9 Perang kat Daera h	90.589.00 0		Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
--	--	-------------------	--	--	-----	----------------------------------	----------------	--	---

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2026.

Renja sebagai salah satu bentuk alat perencanaan yang merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi dan merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan, berapa biaya yang dibutuhkan dan berapa yang dihasilkan dari alokasi anggaran yang ada. Selain itu, anggaran sebagai alat perencanaan juga digunakan untuk melakukan :

- a. Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan ;
- b. Merencanakan berbagai program kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dan merencanakan alternatif sumber pembiayaan ;
- c. Mengalokasikan anggaran untuk berbagai program kegiatan yang telah disusun ;
- d. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategis.

Dengan melaksanakan Rencana Kerja Perubahan ini sangat diperlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh Aparatur Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Kerja Perubahan ini nantinya bukan hanya sebatas sebagai dokumen administrasi, karena secara substansial dokumen ini merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan Visi dan Misi yang ingin dicapai.

Akhir kata semoga Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya Good Government.

Palu, 28 April 2023

KEPALA DINAS  
KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN  
STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH



**SUDARYANO R. LAMANGKONA, S.Sos., M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19690730 199603 1 003